

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL**

ARTIKEL



OLEH :

YANGGI NINGSASRA

NIM :

56307/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

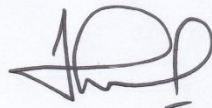
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN
BELANJA MODAL
(Studi Empiris pada Kab/Kota Sumatera Bagian Tengah
Tahun 2009-2013)**

Oleh :
YANGGI NINGSASRA
2010/56307

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
September 2016 dan telah diperiksa/dijetujui oleh kedua pembimbing.

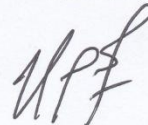
Padang, Juli 2016

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak.
NIP : 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Nayang Helmavunita, SE, M.Sc.
NIP : 19860127 200812 2 001

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Yanggi Ningsasra

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email: yanggie_18@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (2) pengaruh dana lokasi umum terhadap belanja modal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD pada Sumatera bagian tengah untuk tahun anggaran 2009 – 2013. Provinsi yang menjadi sampel penelitian adalah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi dengan bantuan *views 6*.

Berdasarkan analisis simple regresi dengan tingkat signifikansi 0,05, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana tingkat signifikan masing-masing adalah 0.0069 dan 0.000.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, belanja modal

Abstract

This research aimed to test (1) influence region original revenue to capital expenditure (2) influence general fund allocation to capital expenditure. The type of this research is causative research. Sample of this research is the realization of the budget (APBD) report Regency/City in Middle Sumatera from 2009 to 2013. Province in Middle Sumatera that the sample is West Sumatera, Riau, Riau Islands, and Jambi.

Based on a simple regression analysis with a significance level of 0.05, the result of this study concluded: region original revenue (PAD) and general fund allocation (DAU) significantly effect on the capital expenditure, where the significance value 0.000 and 0.020,

Keywords: *region original revenue, general fund allocation, capital expenditure*

1. PENDAHULUAN

Manajemen pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Kewenangan tersebut diberikan secara profesional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pembagian-pembagian keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Selanjutnya, dalam operasionalisasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Belanja Daerah merupakan bagian dari pengeluaran daerah, disamping pengeluaran pembiayaan daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan agar pemerintah daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana belanja daerah dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik

untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2003) dalam Sularno (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stine (1994) dalam Sularno (2013) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Konsekuensi lain dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pemerintah daerah harus menggali potensi-potensi sumber pendapatan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah sumber penerimaan utama bagi suatu daerah. PAD yang diperoleh suatu daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD menjadi tulang punggung yang digunakan untuk membiayai belanja daerah. Penelitian oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) serta Tuasikal (2008) memperoleh hasil bahwa PAD dan belanja modal memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah juga semakin meningkat dimana daerah tersebut akan meningkatkan belanja modalnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan DAU yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting. Dengan adanya DAU ini, alokasi belanja modal akan semakin tinggi. DAU akan memenuhi kebutuhan dasar layanan umum, sehingga PAD akan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap pertambahan belanja modal.

Berdasarkan pemahaman diatas, motivasi yang melandasi penelitian ini adalah pengalokasian anggaran belanja modal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Dimana sarana dan prasarana yang masih rendah di daerah Sumatera bagian tengah, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap

bantuan pemerintah pusat dan masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga hal ini akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di daerah tersebut (Kafi, 2011). Serta Pengalokasian Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan kebutuhan fiskal tidak memadai yang disebabkan antara lain karena terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah, serta sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Sumatera Bagian Tengah (Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi)”***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah, sebagai referensi mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap anggaran belanja modal dan menambah wawasan dan pengetahuan topik yang diteliti.

2. TELAHAH LITERATUR

A. Kajian Teori

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan

umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur APBD yang terbaru adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Adapun bentuk dan susunan APBD yang didasarkan pada Permendagri 13/2006 pasal 22 ayat (1) terdiri atas 3 bagian, yaitu : “pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah”. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok, dan pemberian pinjaman daerah (Permendagri 13/2006). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan laporan APBD yang memakai format keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, maka APBD yang berdasarkan format tersebut terdiri atas 3 bagian, yaitu : pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2. Belanja Modal

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau

menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dimana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002, belanja modal dibagi menjadi:

- 1) Belanja Publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
- 2) Belanja Aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.”

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama (Syaiful, 2006):

1. Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan

pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian pembangunan / pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan belanja modal harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD.

Sehingga jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemerintah Daerah harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya (Nuarisa 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Bratakusumah & Solihin (2002) mengartikan PAD sebagai pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan untuk guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

- a. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :

1. Hasil Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah: "Turun yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku."

2. Hasil Retribusi Daerah

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 28 Tahun 2009).

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bias dengan menerbitkan obligasi daerah.

4. Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2004 : 141), "Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal

dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Saragih (2003 : 98) : Kebijakan DAU merupakan instrumen penyeimbang fiskal antar daerah. Sebab tidak semua daerah mempunyai struktur dan kemampuan fiskal yang sama (*horizontal fiscal imbalance*). DAU sebagai bagian dari kebijakan transfer fiskal dari pusat ke daerah (intergovernmental transfer) berfungsi sebagai faktor pemerataan fiskal antara daerah-daerah serta memperkecil kesenjangan kemampuan fiskal atau keuangan antar daerah.

5. Penelitian Yang Relevan

Terdapat penelitian-penelitian yang relevan yang dapat digunakan sebagai referensi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian kali ini antara lain:

- a. Irma Syafitri (2009) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara. Hasilnya juga Menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.
- b. Nuarisa (2012) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasilnya juga Menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal.

- c. Yovita (2011) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah provinsi se Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- d. Putro (2010) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah. Hasilnya menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- e. Ismail (2011) juga meneliti tentang tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Gorontalo. Hasil ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktifitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja Modal oleh Pemerintah. Peningkatan Belanja Modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002 dalam Nugroho, 2007). Dalam konteks PAD dapat dilihat dari kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, sedangkan belanja modal itu sendiri sumber pembiayaannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah (agen) bertanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan lain-lain. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengalokasian anggaran belanja modal.

2. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) dapat dilihat dari bagaimana tanggung jawab pemerintah memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat melalui Alokasi Anggaran Belanja Modal. Dana Alokasi Umum DAU merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk belanja modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik

yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini merupakan suatu kajian yang berangkat dari berbagai konsep teori dan kajian penelitian yang mendahuluinya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik dan merupakan output pengalokasian sumberdaya. Keterbatasan sumber daya adalah pangkal masalah utama dalam pengalokasian anggaran daerah. Hal ini dapat diatasi dengan menciptakan manajemen pelayanan publik yang terencana dengan baik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kualitas pelayanan publik. Besarnya belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah dalam APBD tentu sangat dipengaruhi oleh posisi keuangan pada daerah tersebut. Posisi keuangan suatu daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada daerah tersebut.

D. Hipotesis

Dari uraian latar belakang, kajian teori dan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

H₂: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang lainnya (Umar, 2003 : 30).

2. Objek Penelitian

Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah seluruh Kabupaten/kota di regional Sumatera Bagian Tengah (Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan kepulauan Riau).

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013. Sampel Metode pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005 : 78). Beberapa pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sample adalah data realisasi PAD, DAU dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi APBD pemerintahan Kabupaten/Kota di Regional Sumatera Bagian Tengah yang terdaftar dalam situs www.djpk.depkeu.go.id pada periode tahun 2009 sampai dengan 2013.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan *pooled data*, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section* selama periode tahun 2009 sampai dengan 2013.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari mendownload situs

www.djpk.depkeu.go.id

6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

b. Variabel Independen

Variabel Independen Kedua dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis induktif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menginterpretasikan nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel penelitian. Sedangkan analisis induktif meliputi model regresi data panel, dan, model estimasi model regresi data panel, pemilihan model, uji asumsi klasik dan uji model.

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni; *Chow test* atau *Likelyhood test* dan *Hausman test*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Data penelitian yang menjadi variabel dependen (Y) yaitu belanja modal sedangkan yang menjadi variabel

independen adalah pendapatan asli daerah (X_1), dan dana alokasi umum (X_2).

Tabel: Statistik Deskriptif

	Y(BELANJA MODAL)	X1(PAD)	X2(DAU)
Mean	247299.9	57364.59	338335.7
Median	172811.3	31757.00	323000.0
Maximum	2066646.	804000.0	1000000.
Minimum	0.000000	50.00000	0.000000
Std. Dev.	258947.6	76172.89	165268.5

B. Analisis Induktif

1. Analisis Regresi Data Panel

a. *Chow Test* atau *Likelyhood test*

Berdasarkan hasil uji *Chow-Test* dengan menggunakan *eviews*, didapat probabilitas sebesar 0,00. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari level signifikan ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model H_0 untuk model ini ditolak dan H_a diterima, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *fixed effect*.

b. *Hausman Test*

Berdasarkan hasil uji *hausman* dengan menggunakan *eviews*, didapat *probability* sebesar 0,000. Nilai *probability* lebih kecil dari pada level signifikan ($\alpha = 0,05\%$), maka H_0 untuk model ini ditolak dan H_a diterima, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah *fixed effects*.

2. Model Regresi Panel

Dari hasil pengolahan menggunakan *eviews* 6 diatas, maka diperoleh persamaan regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = 8.25E+10 + 35805.61 (X_1) + 128124.5(X_2)$$

Keterangan hasil pengujian diatas dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Dari hasil uji analisis regresi panel terlihat bahwa konstanta sebesar $8.25E+10$. Ini artinya jika variabel pendapatan asli daerah (X_1) dan dana alokasi umum (X_2) bernilai nol (0) maka nilai belanja modal sebesar $8.25E+10$

b. Koefisien regresi (β) X_1

Variabel pendapatan asli daerah (X_1) memiliki koefisien regresi sebesar 35805.61. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan pendapatan asli daerah akan menaikkan belanja modal sebesar 35805.61.

c. Koefisien regresi (β) (X_2)

Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum (X_2) sebesar 128124.5. Hal ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu satuan dana alokasi umum akan meningkatkan belanja modal sebesar 128124.5.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa residual data belum terdistribusi dengan normal dimana nilai Jarque-Bera (8.188369) > 2 dan nilai probabilitas $0.016669 < 0.05$ sehingga dianggap belum layak untuk dilakukan uji regresi berganda. Sehingga dilakukan regresi persamaan *semilog* yaitu variabel dependen dalam bentuk *logaritma* dan variabel independen biasa atau sebaliknya (Imam:2012). Hasil yang diperoleh adalah residual sudah berdistribusi normal. Gujarati (2007) menyatakan bahwa asumsi normalitas mungkin tidak terlalu penting dalam set data yang besar, yaitu jumlah data lebih dari 30. Dalam penelitian ini jumlah observasi 245, dimana 49 kabupaten/kota dikali 5 tahun. Jadi, sesuai dengan pernyataan Gujarati (2007) maka penelitian ini berada diatas set data yang besar karena besar dari 30 data, sehingga asumsi

normalitas dalam penelitian ini tidaklah terlalu dipermasalahkan.

2. Uji Autokorelasi

Hasil Pengujian Autokorelasi Durbin-Watson sebesar 1.756920, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi karena berada diantara nilai 1.55-2.46.

3. Uji Heterokedastisitas

Hasil pengujian menunjukkan nilai sig 1.000 untuk variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Maka disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini.

4. Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian menunjukkan model ini tidak terkena masalah multikolonieritas dimana variabel-variabel dalam penelitian memiliki nilai koefisien yang lebih kecil dari standar korelasi 0,8.

D. Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari hasil estimasi regresi panel, diketahui bahwa nilai *R Square* menunjukkan 0.793931. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen 79.3931% sedangkan 20.6069% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model pada penelitian ini.

2. Uji F

Berdasarkan tabel hasil estimasi regresi panel, dapat dilihat bahwa probabilitas F-statisic yang diperoleh sebesar 0.00000 lebih kecil dari sig (0,05). Hal ini menandakan bahwa model regresi linear berganda diterima.

3. Uji Hipotesis (t-test)

Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel hasil estimasi regresi panel, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan tabel hasil estimasi regresi diketahui bahwa koefisien β pendapatan asli daerah bernilai positif sebesar 35805.61, nilai t_{hitung} sebesar 2.729197 dan nilai signifikansi $0.0069 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian **hipotesis 1 diterima**.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berdasarkan tabel hasil estimasi regresi diketahui bahwa koefisien β variabel dana alokasi umum bernilai positif sebesar 128124.5, nilai t_{hitung} sebesar 6.833645 dan nilai signifikansi $0.000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Dengan demikian **hipotesis 2 diterima**.

E. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis pertama diterima dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pendapatan asli daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal daerah. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007) yang menyatakan

bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemerintah Daerah melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal. Selain itu, besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Berdasarkan hasil statistik dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan bahwa alokasi dana yang berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri lebih banyak dialokasikan ke dalam alokasi anggaran belanja modal pemerintah. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan potensi penerimaan daerahnya agar penerimaan yang diterima daerah tersebut menjadi lebih besar, sehingga dana tersebut akan lebih besar juga untuk dialokasikan ke dalam anggaran belanja modal daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya. Hasil statistik dalam penelitian ini dapat memberi acuan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya retribusi dan pajak yang diterima daerah sangat berperan penting dalam pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengalokasikan dana tersebut ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur. Peningkatan alokasi Belanja Modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan

merupakan salah satu yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

Bagi setiap pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar, pemerintah daerah tersebut dituntut untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebesar-besarnya yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerahnya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Potensi penerimaan daerah ini bisa berasal dari berbagai pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah, misalnya pajak reklame, hotel, restoran serta retribusi lainnya. Selain itu pemerintah daerah juga bisa mendapatkan penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya, dan juga melalui penjualan aset dan jasa yang dimiliki daerah.

Contohnya untuk daerah yang mempunyai potensi di sektor pariwisata, pemerintah daerah dapat melakukannya dengan cara membangun sarana prasarana untuk menuju tempat pariwisata tersebut. Sehingga nanti pada akhirnya tempat pariwisata tersebut dapat memberikan pajak dan retribusi, yang merupakan penerimaan daerah. Dari penerimaan daerah tersebut, dapat dipergunakan untuk membiayai segala kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, termasuk digunakan dalam peningkatan infrastruktur lain.

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah Tertinggi adalah Kabupaten Batanghari dari Provinsi Jambi. Dimana Pendapatan Asli Daerah terutamanya berasal pajak daerah dan retribusi daerah, seperti : dari sektor pertanian, pertambangan, hotel, bangunan, penerangan jalan, dan yang lainnya. Sebagai salah satu kabupaten di Jambi, Provinsi Jambi sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan asli Daerah

pada masing-masing daerahnya seperti dari sektor industri, aktivitas perdagangan, bangunan, dan jasa bagi daerah-daerah sekitarnya. Dengan kata lain pemerintah daerah setempat menyediakan fasilitas serta memajukan sektor-sektor sumber penerimaan daerah tersebut agar pendapatan asli daerah dapat diterima dengan maksimal.

Begitu juga dengan provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang memiliki potensi-potensi pendapatan asli daerah yang sangat besar seperti, tambang minyak bumi, sehingga keadaan seperti ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerahnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik melalui pengalokasian belanja modal, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari belanja modal yang sudah dianggarkan, sedangkan sumber belanja modal itu sendiri berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi tidak semua Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Bagian Tengah melakukan hal yang sama untuk menggali kemampuan pendapatan asli daerahnya. Hal ini dapat disebabkan karena kondisi geografis yang berbeda, jumlah penduduk, keadaan demografi yang beragam, dan lain sebagainya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini, ditemukan bahwa hipotesis kedua diterima dan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana alokasi umum dapat meningkatkan belanja modal pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Yovita (2011) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Dana alokasi umum diberikan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam memenuhi anggaran belanjanya. Seperti yang kita ketahui, setiap penerimaan suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya. DAU ini digunakan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Untuk itu setiap anggaran DAU yang diterima oleh pemerintah daerah harus digunakan dengan maksimal dan efektif dalam memenuhi kebutuhan belanja modal daerah. Besaran DAU yang diterima suatu daerah berbeda-beda, tergantung dengan pendapatan asli daerah tersebut.

Tingginya tingkat penggunaan DAU oleh suatu daerah mungkin disebabkan karena dana yang diterima daerah dari pendapatan asli daerahnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan belanja suatu daerah. Atau hal ini bisa juga terjadi karena suatu daerah tidak menggunakan pendapatan daerah secara efektif dan tepat sasaran, sehingga dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah pemerintah daerah masih membutuhkan dana alokasi umum.

Berdasarkan hasil penelitian di Sumatera Bagian Tengah yang mendapatkan Dana Alokasi umum tertinggi dari Tahun 2009 sampai 2013 adalah Kota Padang. Tingginya Dana Alokasi Umum disebabkan oleh celah yang terjadi karena kebutuhan fiskal daerah melebihi kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah daerah membutuhkan bantuan lain berupa Dana Alokasi Umum yang diterima. Sebenarnya Pemerintah daerah dapat meminimalisir celah tersebut apabila Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya yang salah satunya dapat dilakukan melalui Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Seperti Kota Padang yang sebenarnya dapat meminimalisir Dana Alokasi Umum dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan Pendapatan Asli Daerah yang baik seperti pajak daerah, retribusi daerah maupun kekayaan yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang

sah. Apalagi melihat potensi dari kota Padang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang sangat memungkinkan untuk menggali Pendapatan Asli daerahnya dari sektor pariwisata yang kaya kekayaan alam dan dari pendapatan pajak daerah yang didukung dengan jumlah penduduk yang cukup banyak dan luas yang cukup besar yang dari satu sisi dapat dapat meningkatkan pendapatan dan disisi lainnya justru menambah kebutuhan daerah.

Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar.

Dana Alokasi Umum yang dialokasikan untuk kepentingan pembangunan, misal infrastruktur atau layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan sebagainya) atau upaya perluasan lapangan pekerjaan, maka hal ini akan memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dengan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik maupun mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja di sejumlah sentra-sentra lapangan kerja. Dengan demikian, DAU menjadi penting bagi suatu daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan daerah.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu direvisi bagi penelitian selanjutnya antara lain :

1. Peneliti hanya mengambil dua variabel independen sehingga penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari tingkat *R square* sebesar 79,39 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota tertentu yaitu kabupaten/kota yang terdapat pada provinsi-provinsi di Sumatera bagian tengah (Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau).

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar lebih menambah kabupaten/kota yang akan diteliti. Yang mana dalam penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota yang terdapat di Sumatera Bagian Tengah (Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau).
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal dan lebih mengembangkan variabel independen yang lain misalnya seperti Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Halim Abdul, 2004. *“Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”*, *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi VI*, 16-17 Oktober 2003, Surabaya.
- Aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto & Yulia Yustikasari, 2007. *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal : Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali”*, *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28 Juli 2007.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2001. Analisis Varians Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Se Indonesia.
- Ismail, Hedy. 2011. *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Gorontalo*. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga.
- Kurniawan, Septian. 2010. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah*

- dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ponorogo. *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.*
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Mmanajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat: Jakarta.
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2012. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 1 (3) (2013).
- Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010)”. *Diponegoro Jurnal Of Accounting.* Semarang: UNDIP.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan atau Dana Alokasi Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah.*
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi Universitas Diponegoro.*
- Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi,* Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.* Penerbit Ghalia Indonesia
- Sidik, Machfud, 2004. *Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal,* Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Soekarwo, 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah,* Airlangga Uiversity Press, Surabaya.
- Solikin, Ikin. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.
- Stine, William F. 1994, Is local Government Revenue Response ti Federal Aid Simetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an era of Retrenchment. *National Tax Journal.*
- Sugiyono, 2004. *Statistika untuk Penelitian.* Cetakan Keenam. Bandung : CV Alfabeta .
- Sularno, Fitria Megawati. 2013, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi Universitas Widayatama.*
- Syafitri, Irma. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.*

Syaiful, 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan.*

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Universitas Pattimura Ambon. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 1, No. 2. Juli 2008.

Umar, Husein, 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Yovita, Farah Marta. 2011. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia).

www.djpk.depkeu..go.id

1. Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.334627	(48,194)	0.0000
Cross-section Chi-square	517.241241	48	0.0000

2. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	21.113677	2	0.0000

3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan Model *Fix Effect*

Dependent Variable: Y²
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/18/16 Time: 11:44
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 49
Total panel (balanced) observations: 245
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.25E+10	7.98E+09	10.33649	0.0000
X1	35805.61	13119.47	2.729197	0.0069
X2	128124.5	18749.07	6.833645	0.0000

Effects Specification

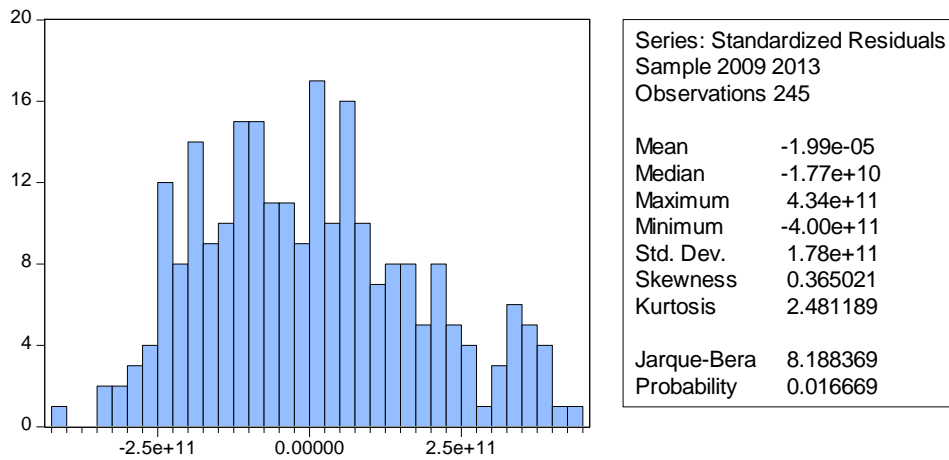
Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared **0.793931** Mean dependent var 4.18E+11

Adjusted R-squared	0.740820	S.D. dependent var	3.49E+11
S.E. of regression	2.00E+11	Sum squared resid	7.76E+24
F-statistic	14.94861	Durbin-Watson stat	1.756920
Prob(F-statistic)	0.000000		

4. Uji Normalitas



5. Uji Heterokedastisitas

Dependent Variable: RESID^2
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/18/16 Time: 11:54
Sample: 2009 2013
Periods included: 5
Cross-sections included: 49
Total panel (balanced) observations: 245
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.14E+45	7.13E+45	0.861743	0.3897
X1	-5.84E+39	2.30E+40	-0.253970	0.7997
X2	-1.33E+40	1.67E+40	-0.797673	0.4258

6. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.104839
X2	0.104839	1.000000